

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**Penguatan Pengajaran dan Penelitian Perubahan Iklim :
Bridging Gap Implementasi Kebijakan Mitigasi dan
Adaptasi di Tingkat Nasional dan Subnasional**

Jakarta, 31 Agustus - 1 September 2016



Jejaring Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia



**Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektor dan Regional
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK**

Prosiding Seminar Nasional
Penguatan Pengajaran dan Penelitian Perubahan Iklim:
***Bridging Gap* Implementasi Kebijakan Mitigasi dan**
Adaptasi di Tingkat Nasional Dan Subnasional

Jakarta, 31 Agustus-1 September 2016



**Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan
Kehutanan Indonesia**



**Direktorat Mobilisasi Sumber Daya
Sektoral dan Regional
Direktorat Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim, KLHK**

Kerjasama

Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia &
Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK

Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pengajaran dan Penelitian Perubahan Iklim: *Bridging Gap* Implementasi Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi di Tingkat Nasional Dan Subnasional

Penyusun :

Yayan Hadiyan, S.Hut, M.Sc
Ifa Elfira Olivia, S.Hut

ISBN : 978-602-73376-1-9

Editor:

Prof. Dr. Ir. Deddy Hadriyanto, M. Agr
Prof. Dr. Ir. Gusti z. Anshari, MES
Prof. Dr. Ir. Udiansyah, MS
Dr. Ir. Abdul Rauf, M.Sc
Dr. Ir. Mahawan Karuniasa, MM
Dr. Ir. Markum, M.Sc
Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si
Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Sc
Ir. Agus Susatya, M.Sc, Ph.D
Dr. Ishak Yassir, S.Hut, M. Sc
Dr. Ir. Sabaruddin, M.Sc
Yayan Hadiyan, S.Hut, M.Sc

Penerbit :

Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia
(APIK Indonesia)

Redaksi :

Jl. Argo No. 1, Bulaksumur Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta
Telp. (0274) 512102, 901420.
Email : apik.indonesia@yahoo.co.id

Design Sampul dan Tata letak:

Edy Wibowo

Cetakan Pertama, Juni 2016

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang :

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2015 ini telah menunjukkan situasi yang sulit dikendalikan. Tidak hanya mengganggu sektor sosial ekonomi, tetapi sektor lingkungan terutama keanekaragaman hayati dan meningkatnya jumlah emisi CO₂ dari kebakaran Gambut yang telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Dalam kondisi ini, Pemerintah tidak bisa diminta bertanggungjawab secara sepihak, tetapi peran serta multi stakeholder menjadi sangat penting.

Para ilmuwan adalah salah satu pihak kunci yang sangat strategis memberikan input kepada pemerintah. Sejumlah persoalan penyebab kebakaran perlu diurai dan berbagai solusi perlu diformulasikan secara ilmiah. Di sisi lain, perubahan iklim di Indonesia juga tidak hanya didorong oleh adanya kebakaran ini. Berbagai penyebab terkait adaptasi dan mitigasi pada berbagai sektor membutuhkan kerjasama banyak pihak. Berbagai pembelajaran berupa inisiatif dan praktik-praktik tata kelola sumber daya alam perlu dicoba dan dikritisi secara kontinyu agar selalu terjadi perbaikan.

Melalui seminar nasional tahunan Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia, kita dapat memberikan masukan kepada para pengambil keputusan tentang pentingnya perbaikan lingkungan khususnya hutan hujan tropis, tidak hanya bagi Indonesia tetapi bagi kepentingan global. Prosiding yang berisi berbagai penelitian terkait dengan perubahan iklim ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita.

Diucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Kehutanan dalam Pelaksanaan Seminar tersebut, segenap panitia dan pihak lainnya. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, Juni 2016
Ketua Umum,

ttd.

Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. PEMETAAN BIOMASSA PADA HUTAN TROPIS DENGAN AIRBORNE LIDAR Jarot Pandu Panji Asmoro	9
2. IMPLIKASI PENGELOLAAN HUTAN TERHADAP SIMPANAN KARBON MANGROVE DI SUMATERA UTARA Onrizal, Nurdin Sulistiyono, Pindi Patana, Mashhor Mansor	25
3. REINTERPRETASI PARADIGMA <i>TIMBER MANAGEMENT</i> PADA PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI UNTUK Mendukung Implementasi REDD+ Ganjar Oki Widhanarto, Ris Hadi Purwanto, Ahmad Maryudi dan Senawi	32
4. STUDI PERSAMAAN ALLOMETRIK UNTUK PREDIKSI BIOMASSA ATAS DAN BAWAH TREMBESI [<i>Albizia saman</i> (Jacq.) Merr.] TINGKAT SEMAI DAN SAPIHAN UNTUK PENGEMBANGAN PENGUKURAN KARBON PADA PROGRAM PERUBAHAN IKLIM Gun Mardiatmoko	49
5. Karbon Tersimpan pada Tegakan Balsa (<i>Ochroma bicolor</i>) di Jawa Yonky Indrajaya	61
6. FLUKS CO ₂ PADA TEGAKAN NIPAH DI DELTA MAHAKAM KALIMANTAN TIMUR Rita Diana, Dedy Hadriyanto, Dinillah Tartila	70
7. ESTIMASI STOK KARBON ORGANIK TANAH DI BAWAH BERBAGAI PENGUNAAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI I Made Gunamantha dan I G.N.A. Suryaputra	79
8. IDENTIFIKASI JENIS POHON DAN POTENSI SIMPANAN KARBON VEGETASI PADA LAHAN PASCA TAMBANG BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KHDTK LABANAN, BERAU, KALIMANTAN TIMUR Rina W. Cahyani, Rizki Maharani dan Asef K. Hardjana	94
9. PENDEKATAN TERPADU SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DALAM ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN Rahmawaty, Najmatul Khairat dan Abdul Rauf	107
10. PENGARUH KEGIATAN UJICOBA REDD+ PADA LINGKUNGAN DAN SOSIAL- EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN Studi di Lokasi Kegiatan Ujicoba REDD+ di Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah Dadang Setiawan dan Mahawan Karuniasa	117

11. POTENSI CARBON DI HUTAN LINDUNG DAN TAMAN NASIONAL DI SUMATRA: TANTANGAN INDC DAN APIK Agus Susatya	133
12. NILAI KERUGIAN SUHU UDARA AKIBAT HUTAN TERBUKA Sari Mayawati dan Jumri	141
13. PEMANFAATAN SUMBER DAYA HASIL HUTAN SECARA OPTIMAL Jumri dan Sari Mayawati	150
14. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM PROGRAM FORCLIME DI KALIMANTAN Catur Budi Wiati dan S. Yuni Indriyanti	164
15. MENYIMAK FENOMENA PEMANASAN GLOBAL/PERUBAHAN IKLIM (<i>La-Nina</i>), ALIH FUNGSI LAHAN DAN MITIGASI KERUSAKAN LINGKUNGAN DI PULAU BALI I Wayan Kasa dan Ida Bagus Gunam	177
16. PEMANFAATAN BATU BARA PERINGKAT RENDAH DALAM MENGIKAT ALUMINIUM PADA OXISOL UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PEMUPUKAN FOSFOR SERTA PRODUKSI PADI DAN JAGUNG Herviyanti, Gusnidar, Harianti, Citra, Hidayati, Edi, dan Mahrizal	185
17. ANALISIS PERAN DAN KONTRIBUSI FITOPLANKTON LAUT DALAM PENGATURAN IKLIM GLOBAL Alianto dan Hendri	195
18. STUDI STATUS MANGROVE DAN PADANG LAMUN UNTUK MENDUKUNG UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI MALUKU Hanung Agus Mulyadi, Andri Irawan, Muhammad Masrur Islami, Dharma arif Nugroho, Arif seno Adji, Frits Pulumahuny, Fredy Leatemia	207
19. KEBIJAKAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM MENYIKAPI PERUBAHAN IKLIM I Putu Gede Ardhana	219
20. STRATEGI PEMBANGUNAN RENDAH EMISI SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016-2021 Edi Cahyono dan Holidi	231
21. EKSPOR PENGETAHUAN GAMBUT TROPIS MELALUI BERBAGAI PROYEK KERJASAMA INTERNASIONAL Gusti Z. Anshari	248
22. PENANDAAN ANGGARAN UNTUK AKSI-AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAERAH: KASUS PROVINSI JAMBI Riko Wahyudi, IBP Angga Antagia, Ayu Satya Damayanti, Rezky Lasekti Wicaksono, Arsyi Rahman Mohammad	255

23. KAJIAN PERUBAHAN TUTUPAN HUTAN DAN SUHU UDARA DI KABUPATEN KUTAI BARAT Akas Pinarigan Sujalu, Abdul Fatah, Jumani, Maya Preva Biantary, dan Heni Emawati	271
24. SEKUESTRASI BAHAN ORGANIK PADA TIGA SEKUENSIAL ALTITUDE DI DAERAH BUKIK SARASAH KAWASAN TROPIS SUPER BASAH, SUMATERA BARAT Yulnafatmawita	279
25. KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE SEBAGAI UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI PULAU-PULAU KECIL (Studi Kasus : Dusun Taman Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat) Debby V Pattimahu	288
26. PENDUGAAN KEBUTUHAN OPTIMAL RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PADA KAWASAN PERKOTAAN KOTA MEDAN SUMATERA UTARA Siti Latifah, Pindi Patana, Rahmawaty dan Ahmad Rivai	298
27. PENILAIAN KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM FORCLIME DI KALIMANTAN Catur Budi Wiati dan S. Yuni Indriyanti	307
28. PENELITIAN DAN PENGAJARAN ETNOBOTANI UNTUK IMPLEMENTASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI KEPULAUAN MALUKU Marcus J. PATTINAMA	322
29. ETNOBOTANI DAN PRIORITAS KONSERVASI SPESIES TUMBUHAN PADA MASYARAKAT O HONGANA MA NYAWA DI DESA WANGONGIRA, KABUPATEN HALMAHERA UTARA Radios Simanjuntak	335
30. PEMBELAJARAN KONSERVASI KURA-KURA DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM: <i>LESSON LEARNT</i> DARI PROGRAM USAID-NSF <i>PEER</i> DI UNIVERSITAS BENGKULU Hery Suhartoyo, Aceng Ruyani dan Bhakti Karyadi	349
31. DINAMIKA MORFOLOGI PANTAI UTARA PAPUA (STUDI KASUS PULAU PIAI) Suhaemi, Marhan dan Ferawati Runtuboi	359
32. BENTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI PADA BERBAGAI LANSEKAP HUTAN DI KOMPLEKS HUTAN MEKONGGA*) Rosmarlinasiah	372
33. DAMPAK DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM PADA PERTEMBAKAUAN DI KABUPATEN JEMBER Yuli Hariyati dan Sastro Djendro Hajuningrat	384
34. APAKAH BENTUK PERTANIAN CERDAS MENGHADAPAI PERUBAHAN IKLIM Muhd Nur Sangadji	396

35. REVITALISASI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BENTUK MITIGASI DI SULAWESI UTARA Martina A. Langi	404
36. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DAN IMPLIKASINYA DALAM KONSERVASI PENYU BELIMBING (<i>Dermochelys coriacea</i>) PASIFIK BARAT DI BENTANG LAUT KEPALA BURUNG, PAPUA Ricardo F. Tapilatu, Dedi Paren den, Hengki Wona, dan William G. Iwanggin	411
37. PENGETAHUAN DAN POLA ADAPTASI PETANI GARAM DALAM MERESPON DAMPAK PERUBAHAN IKLIM Sitti Hilyana	425
38. POLA ADAPTASI PETANI TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM: PERBANDINGAN SISTEM PERTANIAN DUSUNG DAN PADI SAWAH DI PULAU-PULAU KECIL, MALUKU Wardis Girsang, PhD dan Semuel Laimeheriwa	438
39. KONSERVASI SUMBERDAYA GENETIK TANAMAN HUTAN TINGKAT DESA: AKSI LOKAL ADAPTASI KELANGKAAN SPESIES DAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT Liliek Haryjanto dan Yayan Hadiyan	456
40. KERENTANAN DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM PADA USAHATANI DI PULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT Halil Hamzah	463
41. SEMUT SEBAGAI BIOINDIKATOR PERUBAHAN IKLIM DALAM EKOSISTEM HUTAN (STUDI KASUS PADA HUTAN LINDUNG GUNUNG SIRIMAU KOTA AMBON, MALUKU) Dr. Fransina Latumahina,S.Hut.MP dan Esther Kembauw.SP.,M.Si	481
42. KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DESA HULALIU DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Mersiana Sahureka	494
43. PEMBELAJARAN KONSERVASI BIODIVERSITAS DUNG BEETLE DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Bainah Sari Dewi	500
44. PENGARUH BEBERAPA KOMPOSISI BAHAN KOMPOS TERHADAP PRODUKSI DAN SERAPAN HARA TANAMAN SEMANGKA PADA REGOSOL Gusnidar, Syafrimen Yasin dan Gusrimaidayani	514
45. MANAJEMEN POHON BERBASIS KELUARGA MELALUI KARTU PENGEMBANG POHON DALAM PENGELOLAAN LAHAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKm) SEBAGAI STRATEGI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Siswahyono, Agus Susatya, Enggar Apriyanto dan Prasetyo	522

46. MODEL PEMBELAJARAN PENGETAHUAN PERUBAHAN IKLIM DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN Dwi Atmanto	532
47. KEANEKARAGAMAN JENIS BURUNG (STUDI KASUS DI PT GUNUNG MADU PLANTATIONS DIVISI II KABUPATEN LAMPUNG TENGAH) Awang Murdiono, Bainah Sari Dewi, Sugeng P. Harianto	548

KEBIJAKAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM MENYIKAPI PERUBAHAN IKLIM *(Forestry Policies to Take Counter Measure of Climate Change)*

I Putu Gede Ardhana

Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Udayana
Kampus Bukit Jimbaran Denpasar, Bali. Telp. 0361-701954 Ext. 235
e-mail : crescentbali@indo.net.id

ABSTRACT

This research is aimed to study informations about forest covered area that has been suffered from deforestation and forest degradation. This research is related with implementation of governmental commitment to implement REDD +. Firstly researcher examined the historical development of forestry policies from 1967 where forestry concession system was carried out to about 1990 which export of log was prohibited, and development of ply wood and paper wood industries for export was stimulated. In this term, the rate of deforestation and forest degradation was increased mainly in Sumatera and Borneo. Secondly researcher examined the development of concessional forms, such as HPH, HTI, HGU and APL, and in the unplanned incidents such as illegal logging and forest encroachment which spreaded were throughout the major islands in Indonesia. From the results of this research, it was seemed that the deforestation and forest degradation still have been carried out at the same time with development of forestry policies whether planned or unplanned. Since 1985 until 2009, the deforestation area reached 45.27 million hectares, and in 2012 forest degradation area reached 41 million hectares. This research used descriptive method as well as literature approach. The result of this research was described, mentioned interpreted and compiled in the form of papers. From the result of this research, researcher concluded that development of forestry policies for forestry sectors to take counter measure of climate change is far from the ideal, because essentially accumulation of policies were disturbed with governmental commitment for implementing REDD + activities.

Keywords: forestry policies, governmental commitment, REDD +

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji informasi tentang luas tutupan hutan yang telah mengalami kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan REDD⁺. Permasalahan yang dikaji pertama adalah sejarah perkembangan kebijakan sektor kehutanan sejak diberlakukan sistem konsesi hutan tahun 1967 sampai pada larangan mengekspor kayu gelondongan dan merangsang pengembangan industri kayu lapis dan kertas untuk diekspor sekitar tahun 1990, yang mempengaruhi laju deforestasi dan degradasi hutan terutama yang berada di Sumatera dan Kalimantan pada saat itu. Permasalahan kedua adalah perkembangan kebijakan pembangunan di sektor kehutanan baik dalam pembangunan yang di rencanakan berupa konsesi hutan seperti HPH, HTI, HGU dan APL maupun yang tidak direncanakan seperti pembalakan liar dan perambahan hutan yang menyebar di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Dari hasil kajian laju deforestasi dan degradasi hutan masih berjalan seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan kehutanan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, masing-masing berkisar 45,27 juta hektar dalam periode 1985-2009 dan dalam tahun 2012 berkisar 41 juta hektar. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan peraturan dan perundangan serta pendekatan kepustakaan. Hasil kajian ini kemudian dideskripsikan, dinarasikan serta diinterpretasi dan disusun dalam bentuk makalah. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim masih jauh dari harapan karena terjadi tumpang tindih kebijakan yang pada dasarnya menghambat komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kegiatan REDD⁺.

Kata kunci : kebijakan kehutanan, komitmen pemerintah, REDD⁺

I. PENDAHULUAN

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis dengan flora dan faunanya yang beragam dan sangat menarik perhatian dunia dengan luas awalnya 144 juta hektar kini hanya tersisa sekitar 130,68 juta hektar. Tetapi dengan laju deforestasi yang mencapai 1,5 juta hektar per tahun dunia internasional sangat mencemaskan karena kondisi hutan yang semakin menurun. Rekor Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya dan tanggung jawabnya tidak menentu, kerusakan hutan akibat kegiatan deforestasi dan degradasi hutan terus berjalan tahun demi tahun seiring dengan implementasi kebijakan pembangunan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri bahwa isu perubahan iklim akan terus berlanjut seiring dengan laju kegiatan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kepedulian pemerintah dalam menyikapi dampak perubahan iklim di lapangan masih jauh dari harapan. Kepedulian ini nampak jelas pada kebijakan sektor kehutanan yang telah berlangsung sejak diberlakukannya sistem konsesi hutan pada tahun 1967 yang merangsang para pemegang konsesi hutan membalak kawasan hutan yang luas di luar Jawa. Deforestasi dan degradasi hutan semakin menjadi-jadi ketika diberlakukannya larangan ekspor kayu gelondongan dan merangsang para pengusaha untuk mengembangkan industri pengelolaan kayu lapis. Jumlah industri kayu lapis meningkat tajam dan pada tahun 1990 mampu menghasilkan 12,6 juta m³ per tahun. Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) berkembang pesat yang memproduksi kayu lapis kemudian di ekspor sehingga menciptakan kartel pemasaran yang efektif (Barr, 1999).

Dua perundangan yang mendasari kegiatan ini yang ditetapkan pada tahun 1967 yaitu UU tentang Penanaman Modal asing (UU No. 1/1967) dan UU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967). Sejak itu industri kehutanan mengalami tiga tahap perkembangan dengan titik berat berbeda pada tiap tahapan. Tahapan pertama (1967-1979) titik beratnya adalah ekspor kayu bulat; tahap kedua (1980-1990) memfokuskan pada pengembangan industri kayu lapis dan tahapan ketiga sepanjang tahun 1990-an lebih menitik beratkan pada pengembangan industri pulp (bubur kayu) dan kertas (Harjono, 1994:21).

Lahirnya UUPK 1967 tidak dapat membendung arus kekuasaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang mengusir masyarakat di dalam kawasan hutan yang pada dasarnya kehilangan hak adat mereka atas sumber daya lokal dan akhirnya masyarakat disekitar hutan terpinggirkan dan terangsang untuk merambah hutan untuk didudukinya. Perambahan hutan semakin meningkat akibat adanya jalan-jalan utama (*main road*) dan jalan cabang di setiap konsesi HPH. Sumatera yang dulu kaya sumber daya hutan sebagian besar sudah di konversi menjadi perkebunan. Kemudian Kalimantan mulai mengikuti jalan

yang sama (Pelzer, 1982). Mackinnon (1950) mengatakan bahwa 60% pulau Kalimantan masih tertutup hutan tetapi angka itu sudah jauh menurun sejak saat itu.

Dari hasil kajian ini laju deforestasi dan degradasi hutan masih berjalan seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan baik yang direncanakan (konsesi hutan) maupun yang tidak direncanakan (pembalakan dan perambahan) hutan. Kondisi ini dibuktikan dengan luas hutan yang mengalami deforestasi untuk periode 1985-2009 yang mencapai 45,27 juta hektar. Sedangkan degradasi hutan sekitar 41 juta hektar akibat pembalakan liar (Ardhana, 2014). Hasil analisis tutupan hutan yang dirilis pada tahun 1985-2000 mengalami deforestasi sekitar 30,12 juta hektar sedangkan tahun 2000-2009 telah mengalami deforestasi sekitar 15,158 juta ha dengan laju deforestasi 1,51 juta per tahun (FWI, 2011; Ardhana, 2014).

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sudah banyak dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan inisiatif kebijakan kementerian kehutanan dengan membuat RAN GRK dan RAD GRK serta implementasi REDD+ dan kegiatan lainnya seperti melaksanakan workshop diberbagai propinsi dan kabupaten patut diapresiasi. Namun bisakah komitmen ini akan membuahkan hasil kalau tidak ada kesamaan komitmen dari seluruh stakeholder termasuk pemerintah, pihak swasta dan masyarakat terutama dalam pengembangan kebijakan pembangunan yang pada kegiatannya bertentangan dengan kegiatan REDD+.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim sejak tahun 1967 sampai tahun terakhir ini.

II. METODE

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan peraturan dan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan yaitu dengan bersumber dari hasil laporan analisis dari Forest Watch Indonesia yang telah dimodifikasi, Departemen Kehutanan, Dirjen Planologi, Biro Pusat Statistik dan beberapa buku/literature, hasil kajian/penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Hasil kajian ini kemudian dideskripsikan, dinarasi serta diinterpretasi dan disusun dalam bentuk makalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERKEMBANGAN

Deforestasi 1967 - 2000

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri untuk bergerak dibidang pengusaha hutan mengakibatkan berkembangnya perusahaan asing dan dalam negeri untuk meningkatkan peranan sektor kehutanan dalam memacu pembangunan di Indonesia.

Luas hutan yang terdeforestasi telah meningkat dari 600.000 ha di tahun-tahun 1981-1985, menjadi 900.000 ha di tahun 1989. Untuk mengurangi kegiatan deforestasi pemerintah telah mengeluarkan tata cara penebangan yang baru melalui surat keputusan Dirjen Kehutanan Nomor 35/kpts/DD/I/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia (TPI), yang mengandung semangat pelestarian hutan. Sampai tahun 1988 sebagian besar para pemegang HPH tidak konsisten melakukan TPI.

Kegagalan pelaksanaan TPI melahirkan Konsep Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang biayanya diambil dari Dana Jaminan Reboisasi (DJR). Konsep ini bertujuan untuk memulihkan kembali lahan-lahan kosong akibat kegiatan TPI agar segera ditanami kembali dan untuk lahan yangutupan hutannya mengalami kerusakan serius akibat kegiatan TPI di konversi menjadi HTI. Ketegasan pemerintah membangun HTI adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar bahan baku kayu lapis yang diperkirakan memerlukan lahan seluas 6,2 juta ha.

Dalam UUPK tahun 1967, secara jelas mengatur seluruh prosedur pengelolaan hutan dan pemerintah juga memberikan kemudahan pihak swasta untuk mendapatkan izin memiliki HPH dengan syarat membayar biaya konsesi kepada pemerintah dan menyerahkan sejumlah royalty. Dengan dikeluarkannya izin patungan (*joint enterprise*) antara perhutani dengan perusahaan Jepang (Chopdeco) yang beroperasi di Kalteng dengan perimbangan pengusaha nasional 2,1 juta hektar, mitra asing 3,9 juta ha dengan total pemanfaatan hutan (deforestasi) seluas 6 juta ha. Dengan cepat, jumlah hutan yang dijatahkan hutan untuk HPH membengkak. Pada tahun 1978 lahan seluas 35, 9 juta ha telah dikelola oleh 383 pemegang HPH dan tahun 1987 telah meningkat menjadi 564 pemegang HPH dengan luas kawasan 55,468,35 juta ha, seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Hak Penguasa Hutan Per Propinsi (sampai 1987)

No.	Provinsi	Total Unit	Luas Hutan (1.000 Ha)
1	Aceh	20	1.456,50
2	Sumatera Utara	15	1.403,50
3	Sumatera Barat	12	912,00
4	Riau	63	6.072,00
5	Jambi	27	2.408,00
6	Sumatera Selatan	22	2.041,00
7	Bengkulu	5	411,00
8	Lampung	4	183,60
9	Kalimantan Barat	64	6.348,50
10	Kalimantan Tengah	110	11.038,00
11	Kalimantan Selatan	16	1.487,50
12	Kalimantan Timur	102	11.924,25
13	Sulawesi Selatan	10	03,50
14	Sulawesi Tengah	20	2.214,00
15	Sulawesi Utara	4	492,00
16	Sulawesi Tenggara	2	244,00
17	Nusa Tenggara Barat	2	30,00
18	Maluku	25	2.582,00
19	Irian Jaya	15	3.617,00
Total		564	55.468,35

Sumber: Bagian Perencana dan Program, Departemen Kehutanan, 1986

Sekitar tahun 1984 keluar peraturan Pemerintah No. 17 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. Kebijakan peningkatan ekspor non-migas sebagai konsesi ekonomi nasional tidak disadari telah melalap kawasan hutan yang lebih luas. Industri kayu lapis Indonesia mampu bersaing perusahaan sejenis di beberapa Negara seperti di Jepang dari 450 pabrik hanya tinggal 6 pabrik industri kayu lapis pada saat itu dan berkembang sangat pesat.

Pada bulan Oktober 1989 pemerintah tiba-tiba mengeluarkan peraturan baru yaitu meningkatkan pajak ekspor kayu gergajian sebesar \$ 250 – US \$ 2400 per meter kubik, merangsang pertumbuhan industri kertas dan pulp semakin tinggi. Para pengusaha tidak lagi menebang kayu-kayu berdiameter besar melainkan cukup kayu bakau atau kayu jenis lunak walaupun demikian tetap juga mengeksploitasi hutan tropis dan memperluas terjadinya deforestasi.

Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk keperluan non kehutanan juga merupakan bagian dari luas lahan terdeforestasi dan meningkat dua kali lipat sejak Maret 1986 sampai Maret 1987 seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan yang Dialokasi untuk Keperluan Non-Kehutanan

No.	Keperluan	Luas (ha) (sampai Maret '86)	Luas (ha) (sampai Maret '87)
1	Pertanian pangan	39.400	39.400
2	Perkebunan	2.959.055	2.966.555
3	Perikanan	70.717	70.717
4	Peternakan	97.300	97.300
5	Pertambangan		
	- eksplorasi	1.825.766	5.097.540
	- eksploitasi	953.924	1.901.950
	- dll	8.393	14.273
6	Transmigrasi (termasuk pemukiman kembali)	1.072.940	2.837.316
Total		7.026.495	13.025.053

Sumber : Departemen Kehutanan dan Biro Pusat Statistik, 1986

Laju deforestasi Indonesia periode tahun 1985-2009 yang di integrasikan dari data FWI/GFI, 2001 seluas 1,8 juta per tahun, dari Departemen Kehutanan, 2005 seluas 2,84 juta hektar/tahun dan dari hasil analisis FWI seluas 1,51 juta hektar/tahun maka besaran deforestasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Laju Deforestasi Indonesia Periode Tahun 1985-2009

Rentang	Interval Tahun	Laju Deforestasi	TotL (juta hektar)
1985-1997*	12	1,80	21,60
1997-2000**	3	2,84	8,52
2000-2009*	10	1,51	15,15
Total			45,27

Sumber: * FWI/GFW, 2001. "Potret Keadaan Hutan Indonesia"

** Departemen Kehutanan, 2005

Rehabilitasi Lahan Kritis

Untuk menghutankan kembali lahan kritis pemerintah telah meningkatkan rehabilitasi lahan kritis seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rehabilitasi Lahan Kritis, Hasil yang Dicapai dan Target yang Belum Terselesaikan Tahun 1989

No.	Wilayah	Program Rehabilitasi Lahan Kritis (ha)			
		Penghijauan		Penghutanan Kembali	
		Terselesaikan	Sisa	Terselesaikan	Sisa
1	Sumatera	1.323.003	2.298.600	493.58	1.405.900
2	Jawa	3.045.126	1.188.500	-	-
3	Nusa Tenggara	468.811	1.225.900	124.654	1.034.500
4	Kalimantan	137.693	1.165.300	205.772	1.798.300
5	Sulawesi	835.016	965.200	395.893	1.099.300
6	Maluku	4.896	330.400	1.915	305.400
7	Irian Jaya	-	95.800	-	186.800
8	Kepulauan lain	-	-	-	-
Total		5.814.545	7.269.700	1.221.814	5.830.200

Sumber : Anon (1990)

Deforestasi 2000 - 2014

Berdasarkan hasil analisis tutupan hutan antara tahun 2000 sampai tahun 2009 yang dirilis dari FWI (2011) Indonesia telah mengalami deforestasi sekitar 15.158.926,59 hektar dengan laju deforestasi 1.515.892,66 hektar/tahun yang menyebar diseluruh pulau-pulau Indonesia (Ardhana, 2014).

Berdasarkan data tahun 2009, di dalam konsesi HPH, HTI dan HGU (Hak Guna Usaha) masih terdapat tutupan hutan seluas 22,77 juta hektar, yang berada di dalam konsesi HPH seluas 20,42 juta hektar, di dalam konsesi HTI seluas 1,57 juta hektar dan di dalam HGU seluas 0,77 juta hektar (Tabel 5).

Tabel 5. Luas Tutupan Hutan di dalam Konsesi Tahun 2009 (Hektar)

Pulau	HPH	HTI	HGU	Total	Tumpang Tindih		Total Keseluruhan
					HPH, HTI, HGU	Selain HPH, HTI dan HGU	
Sumatera	1.070.678,80	682.732,65	19.437,92	1.772.849,37	56.561,76	9.975.752,27	11.805.161,39
Jawa	-	-	-	-	-	897.978,82	897.978,82
Bali Nusra	-	2.108	-	2.108	-	1.179.495,53	1.181.603,75
Kalimantan	8.854.978,79	426.007,68	759.781,11	10.040.767,58	299.854,01	17.009.621,63	27.350.243,23
Sulawesi	1.077.089,06	35.792,89	-	1.112.881,95	-	7.929.463,23	9.039.345,18
Maluku	852.380,67	19.949,03	-	872.329,7	5.283,95	2.879.501,48	3.757.115,13
Papua	8.566.145,35	411.804,56	-	8.977.949,91	-	25.161.042,79	34.138.992,70
Total	20.421.270,6	1.578.395,0	779.219,03	22.778.886,51	361.699,72	65.029.855,76	88.170.440,19

Sumber : Forest Watch Indonesia, 2011 data dimodifikasi

Selain itu ditemukan luas tutupan hutan dalam areal yang penggunaan lahannya tumpang tindih antara HPH, HTI dan HGU seluas 361.699,72 hektar. Tutupan hutan terluas

dari HPH, HTI dan HGU berada di Kalimantan yaitu seluas 10,04 juta hektar diikuti oleh Papua seluas 8,97 juta hektar dari HPH dan HTI.

Usulan perubahan luas hutan menjadi APL (Areal Penggunaan Lain) berdasarkan draft RTRWP adalah seluas 15.667.432,28 ha (Dirjen Planologi, 2010, Ardhana 2014).

Rehabilitasi hutan dan pembangunan DAS

Sampai tahun 2014 sekitar 2,5 juta hektar sudah menjadikan target pemerintah untuk merehabilitasi hutan seperti yang disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Rehabilitasi Hutan Periode Tahun 2010-2014

Tujuan	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Konservasi	100,000 ha	100,000 ha	100,000 ha	100,000 ha	100,000 ha	500,000 ha
DAS (daerah aliran sungai)	-	389,000 ha	488,000 ha	537,000 ha	540,000 ha	1.954,000 ha
Rehabilitasi hutan kota	2,000 ha	1,000 ha	2,000 ha	2,000 ha	-	6,000 ha
Mangrove dan rawa-rawa	-	1,000 ha	10,000 ha	10,000 ha	10,000 ha	40,000 ha
Jumlah	102,000 ha	500,000 ha	600,000 ha	648,000 ha	650,000 ha	2,500,000 ha

Sumber : Kehutanan Indonesia, 2011

Untuk mendukung penanaman hutan dalam Jumlah besar dan untuk tujuan rehabilitasi lahan, Kementerian Kehutanan telah membangun 8000 kebun bibit rakyat pada tahun 2010. Dan akan dibangun lagi 15.000 kebun bibit rakyat setiap tahun sampai tahun 2014. Setiap kebun bibit rakyat akan memproduksi sebanyak 50.000 bibit per tahun. Disamping itu sebanyak 23 kebun bibit permanen dibangun di 20 propinsi dengan produksi 500.000 bibit per unit per tahun.

B. PEMBAHASAN

Dari hasil data ini hanya dibahas deforestasi dan degradasi hutan secara umum dari sejumlah data kompilasi dari beberapa literature dan di analisis dengan tujuan untuk mengkritisi kebijakan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim.

Dari hasil kajian deforestasi 1967-2000, nampak jelas bahwa sejak ditetapkannya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, perkembangan industri kehutanan berjalan sangat pesat dan mengalami tiga tahap perkembangan, tahap pertama (1969-1979) tahap ekspor kayu bulat; tahap kedua (1980-1990) pengembangan industri kayu lapis dan tahap ketiga sepanjang tahun 1990-an pengembangan industri pulp dan kertas. Kebijakan sektor kehutanan yang mengarah kepada deforestasi yang direncanakan seperti pemberian HPH untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran walaupun telah ada tata cara penebangan sistem TPI yang membatasi penebangan pohon berdiameter di atas 50 cm dengan tujuan agar rotasi penebangan selama 35 tahun dengan pertumbuhan diameter 1 cm per tahun

dapat berjalan berkesinambungan. Namun sebagian besar para pemegang HPH tidak konsisten untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada dalam SK Dirjen Kehutanan No. 35/kpts/DD/I/1972 yang mengakibatkan laju deforestasi dan degradasi hutan semakin bertambah. Kegagalan TPI melahirkan konsep TPTI dan HTI sehingga pihak HPH dilarang untuk mengeksport kayu gelondongan dan memfokuskan pengembangan kayu lapis sekitar tahun 1980-1990. Ketegasan pemerintah membangun HTI adalah untuk memenuhi kebutuhan kayu lapis yang diperkirakan memerlukan lahan seluas 62 juta hektar. Izin patungan antara perhutani dengan perusahaan Jepang juga memanfaatkan hutan seluas 6 juta ha. Pada akhirnya jumlah hutan yang dijatahkan untuk HPH menambah luasan deforestasi hutan seperti terlihat pada tabel 1 dengan total unit HPH sebanyak 564 dengan luas keseluruhan 55,468,35 juta hektar.

Implikasi dikeluarkannya peraturan baru yaitu tentang peningkatan pajak ekspor kayu gergajian yang sangat tinggi berkisar \$ 250- US \$ 2400 per meter kubik mengakibatkan permintaan konsumsi kertas sangat tinggi. Kondisi ini terjadi sepanjang tahun 1990-an pemerintah menitik beratkan pengembangan industri kertas. Para pengusaha tidak lagi menebang kayu berdiameter besar tapi cukup dengan kayu-kayu kecil jenis kayu lunak sebagai bahan baku industri pulp dan kertas.

Luas kawasan hutan yang mengalami deforestasi semakin luas akibat kebijakan sektor kehutanan untuk keperluan non kehutanan antara lain pertanian pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan transmigrasi seperti terlihat pada tabel 2. Total luas kawasan non-kehutanan seluas 13,02 juta hektar yang terjadi pada tahun 1986-1987. Luas tutupan hutan semakin berkurang dengan bertambahnya luas hutan yang mengalami deforestasi pada periode 1985-1997 seluas 21,6 juta hektar dengan laju deforestasi 1,8 juta hektar per tahun, selanjutnya pada periode 1997-2000 seluas 8,25 juta hektar dengan laju deforestasi 2,84 juta hektar per tahun seperti terlihat pada tabel 3. Jadi bila dilihat dari total keseluruhan sejak 1985 sampai dengan 2000 adalah 21,6 juta hektar + 8,52 juta hektar berjumlah 30,12 juta hektar.

Ada beberapa contoh/faktor yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi TPI antara lain karena sebagian besar HPH ternyata tidak konsisten melaksanakan TPI dan pemegang HPH menganggap sanksi terhadap pelanggaran TPI yang berupa teguran keras dan pencabutan ijin HPH bila terjadi kerusakan pohon-pohon muda, pohon kayu perdagangan atau bila kerusakan terjadi lebih dari 10% jumlah pohon inti dikatakan hanya omong kosong yang mengakibatkan hutan tropik alami mengalami kerusakan yang serius yang mengakibatkan luas tutupan hutan semakin berkurang. Kemudian kegagalan pelaksanaan TPI dipoles dengan lahirnya konsep Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang biayanya diambil dari Dana Jaminan Reboisasi (DJR) yang mestinya menjadi hak hutan tropika alami.

Reboisasi hutan produksi tidak memiliki aturan yang jelas. Perangkat pendukung hanyalah berupa kewajiban HPH untuk menyetor US \$ 4 per meter kubik kayu sebagian Dana Jaminan Reboisasi (DJR) melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 dan kewajiban menggunakan sistem TPI. Jika HPH melaksanakan reboisasi maka setoran itu dikembalikan oleh Dephut, namun jika HPH tidak melaksanakan reboisasi maka negara (Dephut) harus melaksanakan reboisasi sendiri dengan dana yang super tinggi. Disamping itu tidak jelas berapa luas hutan yang telah direboisasi oleh pemerintah dari setoran DJR akibatnya sering muncul penyelewengan, seperti bunga deposito DJR sebesar Rp. 660 miliar dipakai untuk membangun gedung Departemen Kehutanan dan membeli Helikopter (Otto Soemarwoto, dkk., 1992).

Pembangunan HTI direncanakan untuk dibangun hanya pada areal yang tidak produktif dalam kawasan hutan produksi atau dalam kawasan yang direncanakan sebagai hutan produksi. Namun demikian data lapangan menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk menebang habis areal hutan yang paling produktif guna mendapatkan kayunya. Kegiatan pembukaan lahan oleh Perusahaan HTI dan Perkebunan Kelapa Sawit (HGU) dianggap sebagai faktor utama memicu kebakaran lahan dan hutan besar-besaran di Indonesia pada tahun 1997-1998 (Dennis, 1999 dalam Ida Ayu Pradnya Resosudarmo, 2003)

Disamping itu adanya kebijakan pemerintah untuk menggalakkan investasi dari dalam negeri yang mengundang investor asing yang diundang pada tahun 1967-1968 saat itu resmi dibuka bagi kalangan swasta. Berangkat dari kebijakan pemerintah tersebut dimulailah pembabatan hutan yang diawali dengan patungan (*joint enterprise*) sehingga jumlah hutan yang dijatahkan untuk HPH membengkak yang mengakibatkan kerusakan hutan semakin parah dan luas tutupan hutan pun semakin berkurang.

Walaupun demikian pemerintah juga melakukan rehabilitasi lahan kritis baik melalui penghijauan maupun berupa reboisasi masing-masing capaian sekitar 5.814. 545 hektar dan 1.221.814 hektar dengan total keseluruhan 7,04 juta hektar yang merupakan bagian dari komitmen REDD+ yang berupa penanaman untuk meningkatkan cadangan karbon hutan.

Dari hasil kajian deforestasi 2000-2014 juga memperlihatkan hutan Indonesia sudah mengalami deforestasi sekitar 15,15 juta hektar dengan laju deforestasi sekitar 1,51 juta hektar per tahun. Kondisi ini terjadi sejak tahun 2000-2009 seperti terlihat pada tabel 3 dengan perubahan luas tutupan hutan yang menyebar diseluruh nusantara, yang memperparah berkurangnya luas tutupan hutan akibat meningkatnya deforestasi sejak periode tahun 1985-2009 dengan total keseluruhan adalah 45,27 juta hektar dan degradasi hutan seluas 41 juta hektar pada tahun 2012 (www.rmol.com).

Data tahun 2009 tentang luas tutupan hutan di dalam areal konsesi jelas mempengaruhi derasnya laju deforestasi karena masing-masing pemilik konsesi seperti HPH, HTI, HGU dan APL akan semauanya mengelola hutannya dan akan memperparah kerusakan atau deforestasi yang dialami seperti yang terlihat pada tabel 5. Dari ke 7 pulau yang

diduduki oleh para konsesi juga memperlihatkan adanya luas tutupan hutan yang tumpang tindih seluas 0,36 juta hektar dalam areal konsesi dan yang terluas terdapat dalam HGU di Kalimantan yang diikuti oleh Papua seperti terlihat pada Tabel 5. Fenomena tumpang tindih kawasan hutan di areal kerja HPH dengan perkebunan ataupun pertambangan sudah merupakan konflik kehutanan yang cukup lama dan banyak yang memunculkan permasalahan dalam pengurusan kehutanan terutama setelah keluarnya UU Otonomi Daerah Tahun 1999 dengan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang tidak diimbangi dengan pembagian kewenangan secara jelas, antara pusat dan daerah pada waktu itu serta penyediaan penyelesaian perselisihan diantara keduanya dan sering mengalami kebuntuan dan tidak ada kepastian hukum yang pada akhirnya tumpang tindih kewenangan dan peruntukan pun merupakan fenomena jamak dalam sektor kehutanan.

Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal sudah cukup jelas dan tegas tercantum didalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang termuat pada Pasal 50 ayat (2); Pasal 50 ayat (3) huruf a – f; UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (1); UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf a; PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 12 ayat (1) dan (2); dan seperti yang tertuang didalam Inpres No. 4 Tahun 2005 yang diperjelas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia.

Dari informasi yang diperoleh bahwa kasus pembukaan hutan secara illegal telah ditangani pemerintah melalui penegakan hukum. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan pembalakan liar, penebangan liar dan perambahan hutan masih terus berlanjut. Adanya persepsi yang berkembang bahwa masyarakat yang menebang adalah rakyat yang mencari kehidupan yang harus dilindungi sehingga masyarakat berhadapan dengan pemerintah adalah isu yang tidak menguntungkan. Disamping itu minimnya jumlah penjaga hutan/polisi hutan yang tersedia disetiap wilayah pengelolaan hutan, sebab lain adalah ketidak mampuan pemerintah setempat untuk menyediakan lapangan pekerjaan pengganti disamping isi regulasi yang mengatur tentang kegiatan masyarakat menambang dan menebang belum dapat diimplementasikan.

Dalam periode tahun 2000-2014 pemerintah juga telah melaksanakan rehabilitasi hutan dengan maksud untuk melestarikan hutan dengan penanaman kembali lahan-lahan kritis seperti terlihat pada tabel 6.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil kompilasi data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan kebijakan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim masih jauh dari harapan terlihat dari luas tutupan hutan nasional baik dalam periode 1967-2000, maupun 2000-2014 terus menurun, yang disebabkan oleh adanya usaha/kegiatan deforestasi dan degradasi hutan yang menyebar diseluruh HPH di Indonesia.
2. Kegagalan pelaksanaan HPH merangsang berubahnya system penebangan hutan TPI menjadi TPTI, HTI, joint enterprise, HGU yang menyebabkan menurunnya luas tutupan hutan akibat adanya deforestasi dan degradasi hutan.
3. Usaha konservasi sebagai bagian dari komitmen REDD+ juga menunjukkan kegagalan akibat kawasan hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi tetap/terbatas ikut tergerus akibat adanya kegiatan pembangunan yang dianggap menguntungkan bagi penghasilan devisa Negara.
4. Usaha penanaman melalui rehabilitasi lahan kritis masih belum memiliki data laporan yang akurat mengenai target/capaian yang berhasil dilaksanakan baik pada tahun 1989 maupun dalam periode 2010-2014.

B. Saran

1. Sangat diperlukan data/informasi yang akurat dari luas tutupan hutan yang masih tersisa secara periodik dari setiap pengusaha baik dalam bentuk HPH, TPTI, HTI, HGU dan APL sehingga komitmen pemerintah dalam menangani perubahan iklim dapat terlaksana dengan sempurna.
2. Perlu pengawasan ketat dari setiap pengusaha yang bergerak dalam bidang kehutanan dengan menerapkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya sampaikan kepada yang telah memberikan kesempatan dan partisipasi dalam mengikuti Seminar Nasional APIK 2016 "Penguatan, Pengajaran dan Penelitian Perubahan Iklim : *Bridging Gap* Impelementasi Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi di Tingkat Nasional dan Subnasional" di Jakarta, 31 Agustus – 1 September 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1990. *Tropical Forestry Action Plan: report of the independent review*, FAO, Kuala Lumpur
- Ardhana, IPG. 2014. Kajian Kegiatan REDD⁺ dalam Perspektif Perubahan Iklim. Prosiding Seminar Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Menuju Tata Kelola Hutan dan Lahan Lestari. APIK Indonesia, Jakarta, 18-19 November 2014.
- Barr, C. 1988. Bob Hasan, The rise of APKINDO, ad the Shifting dynamics of control in Indonesia, *Timber Sector Indonesia* 65:1-36
- Departemen Kehutanan, 1986. *Sejarah Kehutanan Indonesia*. Departemen Kehutanan, Jakarta

- Departemen Kehutanan. 2005. Aktualisasi Kebijakan Kehutanan Kumpulan Siaran Pers Tahun 2005. Departemen Kehutanan, Jakarta
- Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Forest Watch Indonesia dan Washington DC: Global Forest Watch, Bogor
- Hardjono, J. 1994. Resource Utilization and the Environment. Dalam *Indonesia New Order*, disunting oleh H. Hill, Sydney, Australia, Allen and Unwin
- <http://www.rmol.co/read/2012/1/24/86712/41-Juta-Hektar-Hutan-Nasional-Rusak-Akibat-Pembalakan-liar-Resosudarmo>. 2003
- Ida Ayu Pradnya Resosudarmo. 2003. Tinjauan Atas Kebijakan Sektor Perakayuan dan Kebijakan Terkait Lainnya. *Kemana Harus Melangkah?*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kartodihardjo, H. 2003. Masalah Struktural dalam Implementasi Kebijakan Baru Kehutanan *Kemana Harus Melangkah*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kementerian Kehutanan. 2011. *Indonesian Forestry* (Brosur Kehutanan). Pusat Humas Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Mackinnon. 1950. *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Pelzer, KJ. 1982. Planters Against Peasants. The Agrarian Struggle in East Sumatera, 1947-1958. *Verhandelingen van het Koninklijk Instituut de Taal-Land-en Volkenkunde 97*. S'Gravenhage Martinus Nijhoff
- Otto Soemarwoto, M. Soerjani, Wildan Yatim, Aps Sagala, Skephi, A. Hadi Pramono (Walhi). 1992. *Melestarikan Hutan Tropika*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Surat Keputusan Dirjen Kehutanan Nomor 35/kpts/DD/I/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia (TPI), Jakarta
- UURI No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Jakarta
- UURI No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Jakarta UURI No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Jakarta
- UURI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta
- ____ No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta
- ____ No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Jakarta
- Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah R.I.
- InMendagri No. 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia

Kajian Kebijakan Sektor Kehutanan dalam Menyikapi Perubahan Iklim

by I Putu Gede Ardhana

Kerjasama

Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia &
Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK

FILE	KAJIAN_KEBIJAKAN_SEKTOR_KEHUTANAN.DOCX (51.93K)		
TIME SUBMITTED	27-JAN-2016 03:25PM	WORD COUNT	3889
SUBMISSION ID	624515430	CHARACTER COUNT	24334

KAJIAN KEBIJAKAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM MENYIKAPI PERUBAHAN IKLIM

I Putu Gede Ardhana

Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Udayana

e-mail : putu_ardhana@yahoo.com

Abstrak

This research is aimed to study informations about forest covered area that has been suffered deforestation and forest degradation. And then this research is related with implementation of governmental commitment to implement REDD +.

Firstly researcher examined the historical development of forestry policies from 1967 which forestry concession system was carried out to about 1990 which export of log was prohibited, and development of ply wood and paper wood industries for export was stimulated. In this term, the rate of deforestation and forest degradation was increased mainly in Sumatera and Borneo. Secondly researcher examined the development of concessional forms, such as HPH, HTI, HGU and APL, and in the unplanned incidents such as illegal logging, forest encroachment which spreaded were throughout the major islands in Indonesia.

From the results of this research, it was seemed that the deforestation and forest degradation still have been carried out at the same time with development of forestry policies whether planned or unplanned. Since 1985 until 2009, the deforestation area reached 45.27 million hectares, and in 2012 forest degradation area reached 41 million hectares.

This research used descriptive method well as literature approach. The result of this research was described, mentioned interpreted and compiled in the form of papers.

From the result of this research, researcher concluded that development of forestry policies for forestry sectors to take counter measure of climate change is far from the ideal, because essentially accumulation of policies were disturbed with governmental commitment for implementing REDD + activities.

Keywords: forestry policies, governmental commitment, REDD +

I Pendahuluan

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis dengan flora dan faunanya yang beragam dan sangat menarik perhatian dunia dengan luas awalnya 144 juta hektar kini hanya tersisa sekitar 130,68 juta hektar. Tetapi dengan laju deforestasi yang mencapai 1,5 juta hektar per tahun dunia internasional sangat mencemaskan karena kondisi hutan yang semakin menurun. Rekor Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya dan tanggung jawabnya tidak menentu, kerusakan hutan akibat kegiatan deforestasi dan degradasi hutan terus berjalan tahun demi tahun seiring dengan kebijakan pembangunan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri bahwa isu perubahan iklim akan terus berlanjut seiring dengan laju kegiatan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Kepedulian pemerintah dalam menyikapi dampak perubahan iklim di lapangan masih jauh dari harapan. Kepedulian ini nampak jelas pada kebijakan sektor kehutanan yang telah berlangsung sejak diberlakukannya sistem konsesi hutan pada tahun 1967 yang merangsang para pemegang konsesi hutan membalak kawasan hutan yang luas di luar Jawa. Deforestasi dan degradasi hutan semakin menjadi-jadi ketika diberlakukannya larangan ekspor kayu gelondongan dan merangsang para pengusaha untuk mengembangkan industri pengelolaan kayu lapis. Jumlah industri kayu lapis meningkat tajam dan pada tahun 1990 mampu menghasilkan 12,6 juta m³ per tahun. Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) berkembang pesat yang memproduksi kayu lapis kemudian di ekspor sehingga menciptakan kartel pemasaran yang efektif (Barr, 1999).

Dua perundangan yang mendasari kegiatan ini yang ditetapkan pada tahun 1967 yaitu UU tentang Penanaman Modal asing (UU No. 1/1967) dan UU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967). Sejak itu industri kehutanan mengalami tiga tahap perkembangan dengan titik berat berbeda pada tiap tahapan. Tahapan pertama (1967-1979) titik beratnya adalah ekspor kayu bulat; tahap kedua (1980-1990) memfokuskan pada pengembangan industri kayu lapis dan tahapan ketiga sepanjang tahun 1990-an lebih menitik beratkan pada pengembangan industri pulp (bubur kayu) dan kertas (Harjono, 1994:21).

Lahirnya UUPK 1967 tidak dapat membendung arus kekuasaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang mengusir masyarakat di dalam kawasan hutan yang pada dasarnya kehilangan hak adat mereka atas sumber daya lokal dan akhirnya masyarakat disekitar hutan terpinggirkan dan terangsang untuk merambah hutan untuk didudukinya. Perambahan hutan semakin meningkat akibat adanya jalan-jalan utama (*main road*) dan jalan cabang di setiap konsesi HPH. Sumatera yang dulu kaya sumber daya hutan sebagian besar sudah di konversi menjadi perkebunan. Kemudian Kalimantan mulai mengikuti jalan yang sama (Pelzer, 1982). Mackinnon (1950) mengatakan bahwa 60% pulau Kalimantan masih tertutup hutan tetapi angka itu sudah jauh menurun sejak saat itu.

Dari hasil kajian ini laju deforestasi dan degradasi hutan masih berjalan seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan baik yang direncanakan (konsesi hutan) maupun yang tidak direncanakan (pembalakan dan perambahan) hutan. Kondisi ini dibuktikan dengan luas hutan yang mengalami deforestasi untuk periode 1985-2009 yang mencapai 45,27 juta hektar. Sedangkan degradasi hutan sekitar 41 juta hektar akibat pembalakan liar (Ardhana, 2014). Hasil analisis tutupan hutan yang dirilis pada tahun 1985-2000 mengalami deforestasi sekitar 30,12 juta hektar sedangkan tahun 2000-2009 telah mengalami deforestasi sekitar 15,158 juta ha dengan laju deforestasi 1,51 juta per tahun (FWI, 2011; Ardhana, 2014).

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sudah banyak dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan inisiatif kebijakan kementerian kehutanan dengan membuat RAN GRK dan RAD GRK serta implementasi REDD+ dan kegiatan lainnya seperti melaksanakan workshop diberbagai propinsi dan kabupaten patut diapresiasi. Namun bisakah komitmen ini akan membuahkan hasil kalau tidak ada kesamaan komitmen dari seluruh stakeholder termasuk pemerintah, pihak swasta dan masyarakat terutama dalam pengembangan kebijakan pembangunan yang pada kegiatannya bertentangan dengan kegiatan REDD+.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas penulis ingin mengkaji kebijakan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim sejak tahun 1967 sampai tahun terakhir ini.

27

II Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan mengetahui informasi tentang luas tutupan hutan yang telah mengalami kegiatan deforestasi dan degradasi hutan akibat kebijakan pembangunan di sektor kehutanan sejak diberlakukannya konsesi hutan 1967 sampai tahun 2014. Disamping itu untuk mengetahui kebijakan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim terutama dalam mengimplementasikan kegiatan REDD+.

33

III Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan peraturan dan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan yaitu dengan bersumber dari hasil laporan analisis dari Forest Watch Indonesia yang telah dimodifikasi, Departemen Kehutanan, Dirjen Planologi, Biro Pusat Statistik dan 2 beberapa buku/literature, hasil kajian/penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Hasil kajian ini kemudian dideskripsikan, dinarasikan serta diinterpretasi dan disusun dalam bentuk makalah.

IV Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

1. Deforestasi 1967 - 2009

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri untuk bergerak dibidang pengusaha hutan mengakibatkan berkembangnya perusahaan asing dan dalam negeri untuk meningkatkan peranan sektor kehutanan dalam memacu pembangunan di Indonesia.

Luas hutan yang terdeforestasi telah meningkat dari 600.000 ha di tahun-tahun 1981-1985, menjadi 900.000 ha di tahun 1989. Untuk mengurangi kegiatan deforestasi pemerintah telah mengeluarkan tata cara penebangan yang baru melalui surat keputusan Dirjen Kehutanan Nomor 35/kpts/DD/I/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia (TPI), yang mengandung semangat

pelestarian hutan. Sampai tahun 1988 sebagian besar para pemegang HPH tidak konsisten melakukan TPI.

Kegagalan pelaksanaan TPI melahirkan Konsep Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang biayanya diambil dari Dana Jaminan Reboisasi (DJR). Konsep ini bertujuan untuk memulihkan kembali lahan-lahan kosong akibat kegiatan TPI agar segera ditanami kembali dan untuk lahan yang tutupan hutannya mengalami kerusakan serius akibat kegiatan TPI di konversi menjadi HTI. Ketegasan pemerintah membangun HTI adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar bahan baku kayu lapis yang diperkirakan memerlukan lahan seluas 6,2 juta ha.

Dalam UUPK tahun 1967, secara jelas mengatur seluruh prosedur pengelolaan hutan dan pemerintah juga memberikan kemudahan pihak swasta untuk mendapatkan izin memiliki HPH dengan syarat membayar biaya konsesi kepada pemerintah dan menyerahkan sejumlah royalty. Dengan dikeluarkannya izin patungan (*joint enterprise*) antara perhutani dengan perusahaan Jepang (Chopdeco) yang beroperasi di Kalteng dengan perimbangan pengusaha nasional 2,1 juta hektar, mitra asing 3,9 juta ha dengan total pemanfaatan hutan (deforestasi) seluas 6 juta ha. Dengan cepat, jumlah hutan yang dijatahkan hutan untuk HPH membengkak. Pada tahun 1978 lahan seluas 35,9 juta ha telah dikelola oleh 383 pemegang HPH dan 26 n 1987 telah meningkat menjadi 564 pemegang HPH dengan luas kawasan 55,468,35 juta ha, seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Hak Penguasa Hutan Per Propinsi (sampai 1987)

No.	Provinsi	Total Unit	Luas Hutan (1.000 Ha)
1	Aceh	20	1.456,50
2	Sumatera Utara	15	1.403,50
3	Sumatera Barat	12	912,00
4	Riau	63	6.072,00
5	Jambi	27	2.408,00
6	Sumatera Selatan	22	2.041,00
7	Bengkulu	5	411,00
8	Lampung	4	183,60
9	Kalimantan Barat	64	6.348,50
10	Kalimantan Tengah	110	11.038,00
11	Kalimantan Selatan	16	1.487,50
12	Kalimantan Timur	102	11.924,25
13	Sulawesi Selatan	10	03,50
14	Sulawesi Tengah	20	2.214,00
15	Sulawesi Utara	4	492,00
16	Sulawesi Tenggara	2	244,00
17	Nusa Tenggara Barat	2	30,00
18	Maluku	25	2.582,00
19	Irian Jaya	15	3.617,00
Total		564	55.468,35

Sumber: Bagian Perencana dan Program, Departemen Kehutanan, 1986

Sekitar tahun 1984 keluar peraturan Pemerintah No. 17 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. Kebijakan peningkatan ekspor non-migas sebagai konsesi ekonomi nasional tidak disadari telah melalap kawasan hutan yang lebih luas. Industri kayu lapis Indonesia mampu bersaing perusahaan sejenis di beberapa Negara seperti di Jepang dari 450 pabrik hanya tinggal 6 pabrik industri kayu lapis pada saat itu dan berkembang sangat pesat.

Pada bulan Oktober 1989 pemerintah tiba-tiba mengeluarkan peraturan baru yaitu meningkatkan pajak ekspor kayu gergajian sebesar \$ 250 – US \$ 2400 per meter kubik, merangsang pertumbuhan industri kertas dan pulp semakin tinggi. Para pengusaha tidak lagi menebang kayu-kayu berdiameter besar melainkan cukup kayu bakau atau kayu jenis lunak walaupun demikian tetap juga mengeksploitasi hutan tropis dan memperluas terjadinya deforestasi.

Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk keperluan non kehutanan juga merupakan bagian dari luas lahan terdeforestasi dan meningkat dua kali lipat sejak Maret 1986 sampai Maret 1987 seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Kawasan Hutan yang Dialokasi untuk Keperluan Non-Kehutanan

No.	Keperluan	Luas (ha) (sampai Maret '86)	Luas (ha) (sampai Maret '87)
1	Pertanian pangan	39.400	39.400
2	Perkebunan	2.959.055	2.966.555
3	Perikanan	70.717	70.717
4	Peternakan	97.300	97.300
5	Pertambangan		
	- eksplorasi	1.825.766	5.097.540
	- eksplorasi	953.924	1.901.950
	- dll	8.393	14.273
6	Transmigrasi (termasuk pemukiman kembali)	1.072.940	2.837.316
Total		7.026.495	13.025.053

Sumber : Departemen Kehutanan dan Biro Pusat Statistik, 1986

Laju deforestasi Indonesia periode tahun 1985-2009 yang di integrasikan dari data FWI/GFI, 2001 seluas 1,8 juta per tahun, dari Departemen Kehutanan, 2005 seluas 2,84 juta hektar/tahun dan dari hasil analisis FWI seluas 1,51 juta hektar/tahun maka besaran deforestasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Laju Deforestasi Indonesia Periode Tahun 1985-2009

Rentang	Interval Tahun	Laju Deforestasi	TotL (juta hektar)
1985-1997*	12	1,80	21,60
1997-2000**	3	2,84	8,52
2000-2009*	10	1,51	15,15
Total			45,27

Sumber: * FWI/GFW, 2001. "Potret Keadaan Hutan Indonesia"

** Departemen Kehutanan, 2005

Rehabilitasi Lahan Kritis

Untuk menghutankan kembali lahan kritis pemerintah telah meningkatkan rehabilitasi lahan kritis seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rehabilitasi Lahan Kritis, Hasil yang Dicapai dan Target yang Belum Terselamatkan Tahun 1989

No.	Wilayah	Program Rehabilitasi Lahan Kritis (ha)			
		Penghijauan		Penghutanan Kembali	
		Terselesaikan	Sisa	Terselesaikan	Sisa
23	Sumatera	1.323.003	2.298.600	493.58	1.405.900
2	Jawa	3.045.126	1.188.500	-	-
3	Nusa Tenggara	468.811	1.225.900	124.654	1.034.500
4	Kalimantan	137.693	1.165.300	205.772	1.798.300
5	Sulawesi	835.016	965.200	395.893	1.099.300
6	Maluku	4.896	330.400	1.915	305.400
7	Irian Jaya	-	95.800	-	186.800
8	Kepulauan lain	-	-	-	-
Total		5.814.545	7.269.700	1.221.814	5.830.200

Sumber : Anon (1990)

Deforestasi 2000 - 2014

Berdasarkan hasil analisis tutupan hutan antara tahun 2000 sampai tahun 2009 yang dirilis dari FWI (2011) Indonesia telah mengalami deforestasi sekitar **15.158.926,59** hektar dengan laju deforestasi **1.515.892,66** hektar/tahun yang menyebar diseluruh pulau-pulau Indonesia (Ardhana, 2014).

Berdasarkan data tahun 2009, di dalam konsesi HPH, HTI dan HGU (Hak Guna Usaha) masih terdapat tutupan hutan seluas **22,77** juta hektar, yang berada di dalam konsesi HPH seluas

20,42 juta hektar, di dalam konsesi HTI seluas 1,57 juta hektar dan di dalam HGU seluas 0,77 juta hektar (Tabel 5).

Tabel 5. Luas Tutupan Hutan di dalam Konsesi Tahun 2009 (Hektar)

Pulau	HPH	HTI	HGU	Total	Tumpang Tindih HPH, HTI, HGU	Selain HPH, HTI dan HGU	Total Keseluruhan
Sumatera	1.070.678,80	682.732,65	19.437,92	1.772.849,37	56.561,76	9.975.752,27	11.805.161,39
Jawa	-	-	-	-	-	897.978,82	897.978,82
Bali Nusra	-	2.108	-	2.108	-	1.179.495,53	1.181.603,75
Kalimantan	8.854.978,79	426.007,68	759.781,11	10.040.767,58	299.854,01	17.009.621,63	27.350.243,23
Sulawesi	1.077.089,06	35.792,89	-	1.112.881,95	-	7.929.463,23	9.039.345,18
Maluku	852.380,67	19.949,03	-	872.329,7	5.283,95	2.879.501,48	3.757.115,13
Papua	8.566.145,35	411.804,56	-	8.977.949,91	-	25.161.042,79	34.138.992,70
Total	20.421.270,66	1.578.395,03	779.219,03	22.778.886,51	361.699,72	65.029.855,76	88.170.440,19

Sumber : Forest Watch Indonesia, 2011 data dimodifikasi

Selain itu ditemukan luas tutupan hutan dalam areal yang penggunaan lahannya tumpang tindih antara HPH, HTI dan HGU seluas 361.699,72 hektar. Tutupan hutan terluas dari HPH, HTI dan HGU berada di Kalimantan yaitu seluas 10,04 juta hektar diikuti oleh Papua seluas 8,97 juta hektar dari HPH dan HTI.

Usulan perubahan luas hutan menjadi APL (Areal Penggunaan Lain) berdasarkan draft RTRWP adalah seluas 15.667.432,28 ha (Dirjen Planologi, 2010, Ardhana 2014).

Rehabilitasi hutan dan pembangunan DAS

Sampai tahun 2014 sekitar 2,5 juta hektar sudah menjadikan target pemerintah untuk merehabilitasi hutan seperti yang disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Rehabilitasi Hutan Periode Tahun 2010-2014

Tujuan	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Konservasi DAS (daerah aliran sungai)	100,000 ha	100,000 ha	100,000 ha	100,000 ha	100,000 ha	500,000 ha
Rehabilitasi hutan kota	-	389,000 ha	488,000 ha	537,000 ha	540,000 ha	1.954,000 ha
Mangrove dan rawa-rawa	2,000 ha	1,000 ha	2,000 ha	2,000 ha	-	6,000 ha
	-	1,000 ha	10,000 ha	10,000 ha	10,000 ha	40,000 ha
Jumlah	102,000 ha	500,000 ha	600,000 ha	648,000 ha	650,000 ha	2,500,000 ha

Sumber : Kehutanan Indonesia, 2011

Untuk mendukung penanaman hutan dalam Jumlah besar dan untuk tujuan rehabilitasi lahan, Kementerian Kehutanan telah membangun 8000 kebun bibit rakyat pada tahun 2010. Dan akan dibangun lagi 15.000 kebun bibit rakyat setiap tahun sampai tahun 2014. Setiap kebun bibit rakyat akan memproduksi sebanyak 50.000 bibit per tahun. Disamping itu sebanyak 23 kebun bibit permanen dibangun di 20 propinsi dengan produksi 500.000 bibit per unit per tahun.

4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian ini hanya dibahas deforestasi dan degradasi hutan secara umum dari sejumlah data kompilasi dari beberapa literature dan di analisis dengan tujuan untuk mengkritisi kebijakan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim.

Dari hasil kajian deforestasi 1967-2000, Nampak jelas bahwa sejak ditetapkannya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kehutanan, perkembangan industri kehutanan berjalan sangat pesat dan mengalami tiga tahap perkembangan, tahap pertama (1969-1979) tahap ekspor kayu bulat; tahap kedua (1980-1990) pengembangan industri kayu lapis dan tahap ketiga sepanjang tahun 1990-an pengembangan industri pulp dan kertas. Kebijakan sektor kehutanan yang mengarah kepada deforestasi yang direncanakan seperti pemberian HPH untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran walaupun telah ada tata cara penebangan sistem TPI yang membatasi penebangan pohon berdiameter di atas 50 cm dengan tujuan agar rotasi penebangan selama 35 tahun dapat berjalan berkesinambungan. Namun sebagian besar para pemegang HPH tidak konsisten untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada dalam SK Dirjen Kehutanan No. 35/kpts/DD/I/1972 yang mengakibatkan laju deforestasi dan degradasi hutan semakin bertambah. Kegagalan TPI melahirkan konsep TPTI dan HTI sehingga pihak HPH dilarang untuk mengekspor kayu gelondongan dan memfokuskan pengembangan kayu lapis sekitar tahun 1980-1990. Ketegasan pemerintah membangun HTI adalah untuk memenuhi kebutuhan kayu lapis yang diperkirakan memerlukan lahan seluas 62 juta hektar. Izin patungan antara perhutani dengan perusahaan Jepang juga memanfaatkan hutan seluas 6 juta ha. Pada akhirnya jumlah hutan yang dijatahkan untuk HPH menambah luasan deforestasi hutan seperti terlihat pada tabel 1 dengan total unit HPH sebanyak 564 dengan luas keseluruhan 55,468,35 juta hektar.

Implikasi dikeluarkannya peraturan baru yaitu tentang peningkatan pajak ekspor kayu gergajian yang sangat tinggi berkisar \$ 250- US \$ 2400 per meter kubik mengakibatkan permintaan konsumsi kertas sangat tinggi. Kondisi ini terjadi sepanjang tahun 1990-an pemerintah menitik beratkan pengembangan industri kertas. Para pengusaha tidak lagi menebang kayu berdiameter besar tapi cukup dengan kayu-kayu kecil jenis kayu lunak sebagai bahan baku industri pulp dan kertas.

Luas kawasan hutan yang mengalami deforestasi semakin luas akibat kebijakan sektor kehutanan untuk keperluan non kehutanan antara lain pertanian pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan transmigrasi seperti terlihat pada tabel 2. Total luas kawasan non-kehutanan seluas 13,02 juta hektar yang terjadi pada tahun 1986-1987. Luas tutupan hutan semakin berkurang dengan bertambahnya luas hutan yang mengalami deforestasi pada periode 1985-1997 seluas 21,6 juta hektar dengan laju deforestasi 1,8 juta hektar per tahun, selanjutnya pada periode 1997-2000 seluas 8,25 juta hektar dengan laju deforestasi 2,84 juta hektar per tahun seperti terlihat pada tabel 3. Jadi bila dilihat dari total keseluruhan sejak 1985 sampai dengan 2000 adalah 21,6 juta hektar + 8,52 juta hektar berjumlah 30,12 juta hektar.

Walaupun demikian pemerintah juga melakukan rehabilitasi lahan kritis baik melalui penghijauan maupun berupa reboisasi masing-masing capaian sekitar 5.814. 545 hektar dan 1.221.814 hektar dengan total keseluruhan 7,04 juta hektar yang merupakan bagian dari komitmen REDD+ yang berupa penanaman untuk meningkatkan cadangan karbon hutan.

1 Dari hasil kajian deforestasi 2000-2014 juga memperlihatkan hutan Indonesia sudah mengalami deforestasi sekitar 15,15 juta hektar dengan laju deforestasi sekitar 1,51 juta hektar per tahun. Kondisi ini terjadi sejak tahun 2000-2009 seperti terlihat pada tabel 3 dengan perubahan luas tutupan hutan yang menyebar diseluruh nusantara, yang memperparah berkurangnya luas tutupan hutan akibat meningkatnya deforestasi sejak periode tahun 1985-2009 dengan total keseluruhan adalah 45,27 juta hektar dan degradasi hutan seluas 41 juta hektar pada tahun 2012 (www.rmol.com).

Data tahun 2009 tentang luas tutupan hutan di dalam areal konsesi jelas mempengaruhi derasnya laju deforestasi karena masing-masing pemilik konsesi seperti HPH, HTI, HGU dan APL akan samaunya mengelola hutannya dan akan memperparah kerusakan atau deforestasi yang dialami seperti yang terlihat pada tabel 5. Dari ke 7 pulau yang diduduki oleh para konsesi juga memperlihatkan adanya luas tutupan hutan yang tumpang tindih seluas 0,36 juta hektar dalam areal konsesi dan yang terluas terdapat dalam HGU di Kalimantan yang diikuti oleh Papua seperti terlihat pada Tabel 5. Fenomena tumpang tindih kawasan hutan di areal kerja HPH dengan perkebunan ataupun pertambangan sudah merupakan konflik kehutanan yang cukup lama dan banyak yang memunculkan permasalahan dalam pengurusan kehutanan terutama setelah keluarnya UU Otonomi Daerah Tahun 1999 dengan No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang tidak diimbangi dengan pembagian kewenangan secara

1 jelas, antara pusat dan daerah pada waktu itu serta penyediaan penyelesaian perselisihan diantara keduanya dan sering mengalami kebuntuan dan tidak ada kepastian hukum yang pada akhirnya tumpang tindih kewenangan dan peruntukan pun merupakan fenomena jamak dalam sektor kehutanan.

Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal sudah cukup jelas dan tegas tercantum didalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang termuat pada Pasal 50 ayat (2); Pasal 50 ayat (3) huruf a - f; UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 21 ayat (1); UU No. 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf a; PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 12 ayat (1) dan (2); dan seperti yang tertuang didalam Inpres No. 4 Tahun 2005 yang diperjelas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia.

Dari informasi yang diperoleh bahwa kasus pembukaan hutan secara illegal telah ditangani pemerintah melalui penegakan hukum. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan pembalakan liar, penebangan liar dan perambahan hutan masih terus berlanjut. Adanya persepsi yang berkembang bahwa masyarakat yang menebang adalah rakyat yang mencari kehidupan yang harus dilindungi sehingga masyarakat berhadapan dengan pemerintah adalah isu yang tidak menguntungkan. Disamping itu minimnya jumlah penjaga hutan/polisi hutan yang tersedia disetiap wilayah pengelolaan hutan, sebab lain adalah ketidak mampuan pemerintah setempat untuk menyediakan lapangan pekerjaan pengganti disamping isi regulasi yang mengatur tentang kegiatan masyarakat menambang dan menebang belum dapat diimplementasikan.

Dalam periode tahun 2000-2014 pemerintah juga telah melaksanakan rehabilitasi hutan dengan maksud untuk melestarikan hutan dengan penanaman kembali lahan-lahan kritis seperti terlihat pada tabel 6.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan sektor kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim sangat jauh dari harapan karena kalau dibandingkan antara luas hutan yang terdeforestasi dan degradasi hutan dengan rehabilitasi hutan adalah sangat besar. Dalam artian luas tutupan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi hutan adalah sangat besar bila dibandingkan dengan upaya memulihkan kembali kondisi hutan dengan melakukan rehabilitasi, reboisasi, restorasi dan *enrichment planting* dan upaya konservasi hutan yang merupakan kesatuan dari program kegiatan REDD+.

V Kesimpulan

Simpulan

Dari hasil kompilasi data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan kebijakan sector kehutanan dalam menyikapi perubahan iklim masih jauh dari harapan terlihat dari luas tutupan hutan nasional baik dalam periode 1967-2000, maupun 2000-2014 terus menurun, yang disebabkan oleh adanya usaha/kegiatan deforestasi dan degradasi hutan yang menyebar diseluruh HPH di Indonesia.
2. Kegagalan pelaksanaan HPH merangsang berubahnya system penebangan hutan TPI menjadi TPTI, HTI, joint enterprise, HGU yang menyebabkan menurunnya luas tutupan hutan akibat adanya deforestasi dan degradasi hutan.
3. Usaha konservasi sebagai bagian dari komitmen REDD+ juga menunjukkan kegagalan akibat kawasan hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi tetap/terbatas ikut tergerus akibat adanya kegiatan pembangunan yang dianggap menguntungkan bagi penghasilan devisa Negara.
4. Usaha penanam melalui rehabilitasi lahan kritis masih belum memiliki data laporan yang akurat mengenai target/capaian yang berhasil dilaksanakan baik pada tahun 1989 maupun dalam periode 2010-2014.

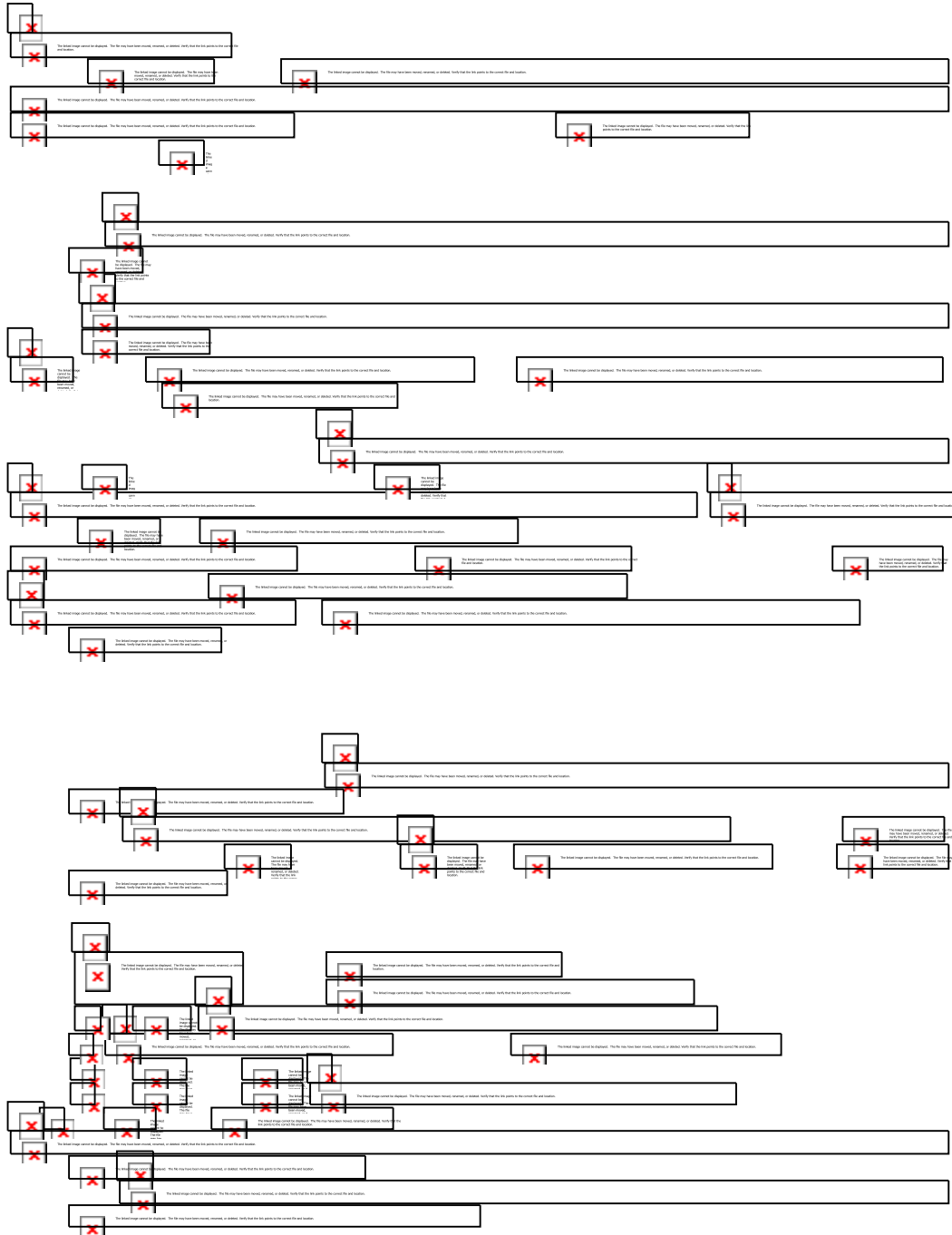
Saran

1. Sangat diperlukan data/informasi yang akurat dari luas tutupan hutan yang masih tersisa secara periodik dari setiap pengusaha baik dalam bentuk HPH, TPTI, HTI, HGU dan APL



Kerjasama

Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia &
Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektor dan Regional, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK



ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	fwi.or.id Internet Source	3%
2	Submitted to iGroup Student Paper	1%
3	www.legio.com.br Internet Source	1%
4	kpawilayahsulawesiselatan.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to University of Wales, Bangor Student Paper	1%
6	distro4hukum.wordpress.com Internet Source	1%
7	www.eu-ilrc.or.id Internet Source	1%
8	Urano, Mariko. "Impacts of newly liberalised policies on customary land rights of forest-dwelling populations: A case study from East Kalimantan, Indonesia : The impacts of newly liberalised policies", Asia Pacific Viewpoint,	1%
		< 1%

9	nto_entre_tecnologia_e_processos_de_neg%c3%9 Int ernet Source	< ^{3ci} %
10	www-wds.worldbank.org Int ernet Source	< 1 %
11	www.mongabay.co.id Int ernet Source	< 1 %
12	www.bphn.go.id Int ernet Source	< 1 %
13	repository.ung.ac.id Int ernet Source	< 1 %
14	www.slideshare.net Int ernet Source	< 1 %
15	Submitted to Udayana University Student Paper	< 1 %
16	walhi.or.id Int ernet Source	< 1 %
17	poultryindonesia.com Int ernet Source	< 1 %
18	www.agrofarm.co.id Int ernet Source	< 1 %
19	www.certificationcanada.org Int ernet Source	< 1 %
20	arc.or.id Int ernet Source	

< 1%

< 1%

21

Int ernet Source

<1%

22

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<1%

23

website.searchengine.web.id

Int ernet Source

<1%

24

w1.dorise.info

Int ernet Source

<1%

25

kinetica.nla.gov.au

Int ernet Source

<1%

26

www.perdici.org

Int ernet Source

<1%

27

rickygrofinger.blogspot.com

Int ernet Source

<1%

28

www.ampl.or.id

Int ernet Source

<1%

29

ba.one.un.org

Int ernet Source

<1%

30

www.docstoc.com

Int ernet Source

<1%

31

Eisenstadt, S. N.. "Anthropological Studies of Complex Societies", Current Anthropology, 1961.
Publication

<1%

32

fpsi.mercubuana-yogya.ac.id

< 1%

33 fp.unimal.ac.id
Internet Source

< 1%

34 R. Daroesman. "Vegetative Elimination of Alang-Alang", Bulletin of Indonesian Economic Studies, 3/1981
Publication

< 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

Kerjasama

Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia &

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY

OFF